

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan batalyon baru di beberapa daerah merupakan salah satu kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara tahun 2020-2024. Ini bertujuan untuk mendorong terwujudnya sinergitas kelembagaan, pemerintah daerah dan rakyat dalam upaya mendayagunakan segala sumber daya demi meningkatkan kemampuan pertahanan nirmiliter. Pertahanan ini merupakan bentuk pertahanan negara yang tidak melibatkan kekuatan militer langsung. Pertahanan ini menggunakan berbagai upaya non-fisik seperti pemberdayaan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan teknologi untuk melindungi kepentingan nasional. Ini berbeda dengan pertahanan militer yang menggunakan kekuatan bersenjata. Pertahanan teritorial adalah pilar penting doktrin keamanan nasional kita. Ini adalah kelanjutan logis dari doktrin pertahanan kita. Pertahanan teritorial adalah tulang punggung pertahanan negara.

Secara umum pelaksanaan pertahanan teritorial tidak dapat dipisahkan dari dinamika hubungan sipil–militer yang menjadi salah satu elemen penting dalam kajian politik, terutama pada negara demokrasi yang memiliki pengalaman konflik internal. Dalam sistem demokrasi, militer seharusnya berada di bawah kendali otoritas sipil serta menjalankan fungsi pertahanan negara secara profesional sesuai dengan prinsip supremasi sipil. kendali otoritas sipil serta menjalankan fungsi pertahanan negara secara profesional tanpa terlibat dalam praktik politik. Meskipun demikian, dalam realitasnya, hubungan antara sipil dan militer cenderung bersifat dinamis karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti

kondisi keamanan, stabilitas politik, serta dinamika sosial yang berkembang di suatu negara.

Dalam konteks Indonesia pasca reformasi, hubungan sipil–militer mengalami transformasi yang cukup signifikan sebagai bagian dari proses konsolidasi demokrasi. Reformasi di sektor keamanan mendorong militer untuk melepaskan diri dari keterlibatan politik praktis serta menghapus peran sosial-politik yang sebelumnya melekat kuat. Namun demikian, berbagai kajian menunjukkan bahwa militer belum sepenuhnya terbebas dari pengaruh politik, terutama melalui keterlibatannya dalam operasi militer selain perang, seperti penanganan bencana, misi kemanusiaan, dan penanggulangan terorisme. Keterlibatan tersebut pada dasarnya juga berkaitan dengan upaya mempertahankan eksistensi dan kepentingan institusional militer, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Di sisi lain, perkembangan ideologi militer pada era demokrasi menunjukkan adanya kecenderungan untuk tetap menjaga pengaruh dalam kehidupan sosial dan politik melalui penanaman nilai-nilai tertentu yang dijadikan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini menandakan bahwa militer masih memegang peran strategis, tidak hanya dalam bidang pertahanan, tetapi juga dalam memengaruhi dinamika sosial dan politik di Indonesia.

Di Indonesia Aceh merupakan wilayah yang memiliki sejarah panjang konflik politik dan bersenjata antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Konflik yang berlangsung dari tahun 1976-2005 tersebut telah membentuk karakter hubungan sipil–militer yang kompleks serta sensitif terhadap berbagai perubahan kebijakan. Oleh sebab itu, setiap kebijakan yang berkaitan

dengan sektor keamanan di Aceh berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap stabilitas sosial dan politik masyarakat setempat.

Setelah penandatanganan Nota Kesepahaman Helsinki atau biasa disebut MOU (Memorandum of Understanding) pada tanggal 15 agustus 2005 di Finlandia, Aceh memasuki masa perdamaian yang ditandai dengan penarikan pasukan non-organik, menurunnya keterlibatan militer dalam kehidupan sipil, serta meningkatnya peran pemerintah daerah dan masyarakat sipil. Kondisi ini diharapkan mampu mendorong terwujudnya hubungan sipil–militer yang lebih demokratis, profesional, dan akuntabel. Namun demikian, dinamika keamanan di Aceh tetap mengalami perkembangan seiring dengan perubahan kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006).

Konflik bersenjata yang terjadi di Aceh antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) selama sekitar tiga puluh tahun, yakni sejak 1976 hingga 2005, telah memberikan pengaruh besar terhadap kondisi sosial, politik, dan psikologis masyarakat. Konflik tersebut tidak hanya menyebabkan banyak korban jiwa serta kerusakan materi, tetapi juga meninggalkan trauma kolektif yang masih dirasakan oleh masyarakat hingga kini. Berbagai bentuk tindakan kekerasan, seperti operasi militer, penangkapan tanpa prosedur hukum yang jelas, penghilangan paksa, penyiksaan, pembakaran tempat tinggal, hingga kehilangan anggota keluarga, menjadi pengalaman traumatis yang dialami oleh sebagian masyarakat Aceh. Pengalaman tersebut kemudian membentuk ingatan kolektif yang kuat serta memengaruhi persepsi masyarakat terhadap isu keamanan dan keberadaan institusi militer di daerah mereka.

Dalam perkembangan terbaru, kebijakan pembangunan batalyon Teritorial pembangunan di Aceh kembali menjadi perhatian berbagai pihak yang memunculkan pro-kontra ditengah-tengah masyarakat maupun di berbagai platform sosial media, seperti hal nya pada berita yang rilis pada salah satu platform media sosial tiktok yang membahas tentang tidak sesuai perjanjian MOU yang terdapat di dalam point 4.7 dalam naskah kesepakatan damai MOU helsinki yang mengatur tentang batas jumlah personel militer yang di izinkan tetap bertugas di aceh pascarelokasi, yakni menetapkan jumlah tentara organik yang di tinggalkan sebanyak 14.700 personil. sedangkan penambahan pembangunan batalyon artinya menambah jumlah personil yang semula menjadi kesepakatan. Hal ini dapat di lihat dari jumlah pembangunan 5 batalyon yang jumlahnya menjadi sekitar ± 2.101 personil TNI Organik (MoU Helsinki, 2005)

Berikut ini ada beberapa daerah yang menjadi tempat pembangunan penambahan batalyon baru diantaranya yaitu:

Tabel 1. 1
Pembangunan Batalyon Baru Aceh

NO	Yon-TP	Daerah	Tahun
1.	Brigif TP 90/ Yudha Giri Dhanu	Aceh Tengah	2025
2.	Yon-TP 853/Bawar Raje Bur	Aceh Timur	2025
3.	Yon-TP 854/Dharma Kersaka	Aceh Tengah	2025
4.	Yon-TP 855/Raksaka Dharma	Gayo Lues	2025
5.	Yon-TP 856/Satria Bumi Sakti	Nagan Raya	2025
6.	Yon-TP 857/Gana Gajahsora	Pidie	2025

(Sumber: Korem 011/Lilawangsa)

Menurut Danrem 011/Lilawangsa, Kolonel Inf Ali Imran, dalam wawancaranya dengan RRI Lhokseumawe mengenai program Batalyon Teritorial Pembangunan, beliau menyatakan bahwa penambahan Batalyon Teritorial

Pembangunan merupakan upaya untuk memperkuat keamanan wilayah sekaligus mendukung program pembangunan pemerintah, terutama dalam bidang ketahanan pangan. Ia menjelaskan bahwa batalyon ini tidak hanya bertugas menjaga pertahanan, tetapi juga berperan dalam kegiatan pertanian, peternakan, perikanan, serta pemberdayaan masyarakat. Melalui berbagai kegiatan tersebut, diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat dan ketahanan wilayah menjadi lebih kuat. Selain itu, keberadaan batalyon ini juga diharapkan dapat memperkuat kerja sama antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan (Ali Imran dalam RRI Lhokseumawe, 2025).

Pada pertengahan Juli 2025, TNI AD telah meresmikan pengoperasian lima Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) di Aceh. Yang Dimana fuungsi dan tujuan Yon-Tp ini diantaranya:

1. Ketahanann pangan, yang dimana fungsi ketahanan pangan ini memiliki tujuan untuk mengelola lahan tidur, mendukung swasembada pangan daerah, serta mendukung program nasional seperti makan bergizi gratis.
2. Pertahanan wilayah, yang dimana pertahanan wilayah ini memiliki tujuan untuk menjaga kedaulatan, keamanan dan stabilitas teritorial, terutama di wilayah perbatasan atau di daerah rawan.
3. Pembangunan dan kemanusiaan, yang Dimana untuk Membantu pemerintah daerah dalam pemerataan Pembangunan infrastruktur dan tanggap darurat bencana.
4. Kemanunggalan TNI-Rakyat, yang Dimana untuk Menjadi motor penggerak eklonomi Masyarakat setempat melalui pemanfaatan kompi-kompi khusus.

Perlu dipahami bahwa Aceh memiliki letak geografis yang strategis serta dinamika sejarah keamanan yang cukup beragam. Oleh sebab itu, kebijakan penambahan batalyon Pembangunan dapat dipandang sebagai upaya antisipatif untuk menjaga stabilitas wilayah agar kondisi tetap aman dan masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan nyaman. Selama penerapannya dilakukan sesuai aturan hukum, tetap menghormati hak-hak sipil masyarakat, serta mengutamakan pendekatan yang humanis, keberadaan tambahan personel militer tidak secara langsung dapat dianggap sebagai ancaman bagi kehidupan sosial masyarakat, melainkan untuk membantu ketahanan pangan seperti Bertani, berternak, berkebun, membangun jembatan dll (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004; Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2025).

Meskipun sempat mendapat penolakan dari berbagai unsur masyarakat Aceh karena beragam alasan, kehadiran lima batalyon pembangunan ini diharapkan mampu menjadi motor penggerak kesejahteraan Masyarakat berikut adalah profil singkat dari kelima Batalyon Pembangunan yang telah memulai operasionalnya di Aceh (Kompas.com, 2025; RRI, 2025).

1. Pembentukan Brigif TP 90/Yudha Giri Dhanu

Selain lima Yonif TP, Kodam Iskandar Muda secara resmi telah membentuk satuan baru, Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan 90 (Brigif TP-90/Yudha Giri Dhanu), yang berkedudukan di Provinsi Aceh. Bersamaan dengan peresmian Yonif TP 854/Dharma Kersaka, Brigif TP-90/Yudha Giri Dhanu juga telah disambut pada 16 Juli 2025 di Aceh Tengah.

Peran Brigade ini krusial dalam memberikan dukungan dan komando dalam pembentukan satuan Yonif TP. Dalam peluncuran resminya, disebutkan bahwa brigade ini akan membawahi empat Yonif TP. Namun, data terbaru menunjukkan bahwa Brigif TP-90/Yudha Giri Dhanu direncanakan akan membawahi lima Yonif TP tersebut di atas (Kodam Iskandar Muda, 2025).

2. Batalyon Teritorial Pembangunan 853/Bawar Raje Bur

Diresmikan aktif sejak 16 Juli 2025, Yonif TP 853/Bawar Reje Bur ditempatkan di Kabupaten Aceh Timur, dengan upacara penyambutan di halaman Kompi Senapan A Yonif 111/KB, Dusun Baro Jaya, Desa Gampong Keude, Kecamatan Peudawa. Batalyon ini terdiri dari sekitar 423 prajurit dan operasional di bawah Kodam Iskandar Muda. Yonif TP 853/Bawar Reje Bur dianggap sebagai mitra strategis dalam pembangunan daerah, khususnya di sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan infrastruktur, diharapkan membawa “energi baru” untuk percepatan kesejahteraan di Aceh Timur (Kodam Iskandar Muda, 2025).

3. Batalyon Teritorial Pembangun 854/Dharma Kersaka

Berlokasi di Aceh Tengah, Yonif TP 854/Dharma Kersaka secara resmi beroperasi sejak 16 Juli 2025. Upacara penyambutan digelar di lapangan Kompi D Yonif 114/SM, Paya Tampu, Rusip Antara. Saat ini, sebanyak 600 prajurit telah diterjunkan, dengan rencana penambahan personel hingga lebih dari 1.000 dalam tiga gelombang rekrutmen. (Kodam Iskandar Muda, 2025).

Batalyon ini berada di bawah satuan Brigif 90/Yudha Giri Dhanu. Yonif TP 854/Dharma Kersaka dibentuk sebagai satuan strategis yang siap menghadapi ancaman militer, berkontribusi dalam pembangunan, dan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat. Unit ini memiliki Kompi Senapan, Kompi Kesehatan, Kompi Pertanian, Kompi Pembangunan, dan Kompi Peternakan.

4. Batalyon Teritorial Pembangunan 855/Raksaka Dharma

Yonif TP 855/Raksaka Dharma bermarkas di Kecamatan Dabun Gelang, Gayo Lues, dan mulai beroperasi pada 18 Juli 2025. Batalyon ini diperkuat sekitar 420 personel dan dipimpin oleh Mayor Inf Irvan Nugraha Rodin. Peran utamanya adalah mendukung pertahanan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat di wilayah terpencil Gayo Lues (Kodam Iskandar Muda, 2025).

5. Batalyon Teritorial Pembangunan 856/Satria Bumi Sakti

Personel Yonif TP 856/Satria Bumi Sakti mulai ditempatkan awal Juli 2025, bermarkas di Desa Blang Sapek, Kecamatan Suka Makmue, dan Desa Meunasah Teungoh, Kecamatan Beutong. Batalyon ini memiliki sekitar 237 personel dengan fokus utama pada penguatan pertahanan lokal dan dukungan pembangunan masyarakat (Kodam Iskandar Muda, 2025).

6. Batalyon Teritorial Pembangunan 857/Gana Gajahsora

Meskipun terdapat informasi sebelumnya mengenai rencana pembangunan Yonif TP 857 di Aceh Singkil yang sempat dikaji ulang, kini telah terkonfirmasi aktivitas Yonif TP-857/Gana Gajahsora (GG) di Kabupaten Pidie yang dimulai pada pertengahan Juli 2025. Markas batalyon ini berlokasi di Desa Turue Cut, Kecamatan Mane, Kabupaten Pidie. Yonif TP-857/Gana Gajahsora yang berkedudukan di Pidie memiliki 421 personel prajurit. Mereka baru saja tiba dan disambut di lapangan Kompi Senapan D 113/JS, Desa Turue Cut, Kecamatan Mane, Pidie, pada Kamis 17 juli 2025 (Kodam Iskandar Muda, 2025).

Kebijakan tersebut dipahami sebagai bagian dari upaya memperkuat pertahanan dan menjaga stabilitas keamanan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Akan tetapi, dalam konteks Aceh sebagai daerah pascakonflik, kebijakan ini tidak dapat dilepaskan dari aspek historis serta kondisi psikologis masyarakat terhadap kehadiran militer.

Sebagian kelompok masyarakat sipil memandang bahwa penambahan batalyon pembangunan berpotensi mengganggu keseimbangan hubungan sipil–militer yang telah terbentuk sejak masa perdamaian. Kekhawatiran tersebut berkaitan dengan kemungkinan meningkatnya kembali peran militer dalam ranah sipil, melemahnya prinsip supremasi sipil, serta potensi munculnya ketegangan sosial dan politik. Di sisi lain, terdapat pula pandangan yang menilai bahwa kehadiran militer dapat memberikan rasa aman serta memperkuat stabilitas wilayah.

Selain berdampak pada hubungan antara militer dan masyarakat sipil, kebijakan penambahan batalyon pembangunan juga berpengaruh terhadap peran pemerintah daerah. Dalam sistem pemerintahan daerah yang demokratis, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam menjaga ketertiban sosial dan keamanan masyarakat. Peningkatan kehadiran militer berpotensi menciptakan pola hubungan baru dalam hal pembagian peran dan koordinasi antara otoritas sipil dan militer, yang selanjutnya dapat memengaruhi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang, Adapun permasalahan yang di jadikan sebagai rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu,

1. Bagaimana dampak dari penambahan batalyon di Aceh terhadap hubungan sipil-militer paska MOU Damai Helsinki?

1.3. Fokus Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka fokus penelitian ini Adalah:

1. Fokus penelitian ini yaitu untuk mengetahui dampak atau reaksi apa yang di rasakan pada masyarakat sipil atas penambahan batalyon Pembangunan baru yang di tempatkan di beberapa daerah yang ada di aceh khususnya dalam aspek khusus untuk batalyon Pembangunan.
2. Fokus penelitian ini juga diarahkan untuk menganalisis bagaimana penambahan batalyon Pembangunan memengaruhi pola hubungan dan pembagian peran antara militer, pemerintah daerah, dan masyarakat sipil di Aceh, khususnya dalam konteks koordinasi keamanan, stabilitas sosial, serta keberlanjutan perdamaian di wilayah pascakonflik.

1.4. Tujuan Penelitian

1. Mengkaji pengaruh penambahan batalyon khusus untuk Pembangunan terhadap dinamika hubungan sipil–militer di Aceh, terutama dalam hal pola interaksi, tingkat kepercayaan, dan persepsi masyarakat terhadap militer.

2. Menganalisis implikasi kebijakan penambahan batalyon terhadap stabilitas sosial serta hubungan antara militer, pemerintah daerah, dan masyarakat sipil di Aceh.

1.5. Manfaat penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka manfaat penelitian ini Adalah

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan ilmu politik dan studi pertahanan, khususnya dalam menganalisis dinamika hubungan sipil–militer di wilayah pascakonflik. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya kajian ilmiah terkait implikasi penambahan kekuatan militer terhadap keseimbangan antara kontrol sipil dan profesionalisme militer dalam konteks daerah berciri khusus seperti Aceh.

1. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini memiliki empat manfaat, antara lain

- a) Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pertahanan dan keamanan, terutama yang berkaitan dengan penempatan serta penambahan satuan militer di wilayah Aceh, sehingga kebijakan tersebut tetap sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan kepentingan masyarakat sipil.

- b) Bagi institusi militer

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi institusi militer dalam mengembangkan pendekatan yang lebih humanis serta

mempererat hubungan yang positif dan konstruktif dengan masyarakat sipil, khususnya dalam pelaksanaan tugas di wilayah pascakonflik.

c) Bagi masyarakat sipil

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada masyarakat mengenai tujuan dan implikasi penambahan batalyon, sehingga mendorong terciptanya komunikasi dan hubungan yang lebih harmonis antara masyarakat sipil dan aparat militer.

d) Bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai sumber rujukan bagi mahasiswa, peneliti, dan akademisi yang memiliki minat terhadap kajian hubungan sipil–militer, keamanan regional, serta dinamika pascakonflik di Aceh, sekaligus menjadi pijakan awal bagi pengembangan penelitian selanjutnya dengan tema yang sejenis.